

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anggraini, & Wahyuni. (2022). Peranan dan analisis faktor produksi subsektor bahan galian golongan C di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics (OffStat)*, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Budiono, A. (2019). Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi. *Jurnal Hukum Responsif*, 15(1), Universitas Swadaya Gunung Jati.
- Gosal, R. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pertambangan ilegal ditinjau dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Lex Privatum*, 12(3), Universitas Sam Ratulangi.
- Widyaningrum, T. (2024). Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Pertambangan Minerba Pasca Perubahan UU Minerba. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*.
- Satriawan, I. (2025). Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Jurnal Esensi Hukum*.
- Lumintang, C. V. (2020). *Aspek Hukum Pemberian Izin Usaha Bisnis Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Lex Et Societatis, 8(4).
- Hanaya, Esther dkk. 2024. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Operasi Pertambangan: Penilaian Hukum Terhadap PT. Timah Tbk*. Jurnal Beinding, Vol. 02 No. 02.

- Suci, Marwah. (2021). *Kepastian Hukum Pengelolaan Wilayah Pertambangan dan Penerbitan IUP Menurut UU Minerba*. Jurnal Marwah Hukum, Vol. 2 No. 1. Hal. 12–15.
- Sanawiah, & Istani. (2022). *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sebagai Tindak Pidana dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), Universitas Islam Kalimantan.
- Panjua, G. G. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)*. Lex Privatum, 6(5), 67-71.
- Sitorus, A. (2020). *Peran disiplin pekerja terhadap keselamatan kerja di industri pertambangan*. Jurnal Ilmu K3, 12(2), 90–92.

Buku

- Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Romli, H., S.A., M.Ag., et al. (2024). *Perlindungan hukum*. Jakarta: CV Mitra Wacana Media.
- Supramono, G. (2012). *Hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wantu, F. M. (2020). *Pengantar ilmu hukum: Buku ajar*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Rahardjo, S. (2003). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018),
hlm. 45.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),
hlm. 32.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 36–
37, 85–87.

Undang – undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Peraturan Menteri ESDM, Permen ESDM No. 25/2018 dan Permen ESDM No.
26/2018.

Internet

[https://dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-
penelitian-kualitatif](https://dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif). Diakses tgl 09 november 2025.